

POLA PEMIKIRAN FILSAFAT POLITIK ABDOLKARIM SOROUSH**Adi Bunardi**

Sekolah Tinggi Filsafat Islam Sadra, Jakarta

Email: *kritikusbuku@gmail.com***ABSTRACT**

The ideas of freedom, justice, democracy, and secularism are the main themes in the study of political philosophy. In the context of religious and political relations, conversations about justice, democratic freedom, and political secularism are the main themes in the Islamic world. One of them is the debate on philosophical political thought that took place in Iran, after the revolution. The idea of the relation between religion and politics, especially the relation between Islam and democracy which requires freedom and justice, has become an ongoing and ongoing philosophical political discourse. The main figure who became the vanguard in building religious and political relations based on freedom and justice was Abdolkarim Soroush. By using interpretive descriptive analysis and literature study coupled with a historical approach, this article attempts to explain Abdolkarim Soroush's view on the relationship between religion and politics, especially Islam and democracy with the themes of freedom, justice, secularism, and restricted democracy. The results obtained regarding the fundamental difference between political secularism and philosophical secularism according to Soroush are the roots and objectives. Soroush believes that political secularism is an alternative in solving the problem between religion and politics, both in religious societies and in non-religious or secular societies. Regarding democracy, Soroush views democracy as an anti-tyranny theory. As for justice, he considers justice to have roots in Islamic teachings and to be the basis of modern political life. In terms of freedom, Soroush views freedom as dynamic. Soroush divides the concept of freedom into political and philosophical, in the political dimension, freedom is identical with democracy.

Keywords: *Democracy, Freedom, Justice, Political Philosophy, Secularism.*

ABSTRAK

Ide tentang kebebasan, keadilan, demokrasi, dan sekularisme adalah tema utama dalam kajian filsafat politik. Dalam konteks relasi agama dan politik, percakapan tentang keadilan, kebebasan demokrasi, dan sekularisme politik menjadi tema utama dalam dunia Islam. Salah satunya adalah perdebatan pemikiran politik filosofis yang terjadi di Iran, pasca revolusi. Gagasan relasi agama dan politik, khususnya relasi Islam dan demokrasi yang mensyaratkan kebebasan dan keadilan menjadi wacana politik filosofis yang sedang dan terus berlangsung. Tokoh utama yang menjadi garda depan dalam membangun relasi agama dan politik yang berbasiskan pada kebebasan dan keadilan adalah Abdolkarim Soroush. Dengan menggunakan analisis deskriptif interpretatif dan studi literatur yang dibarengi dengan pendekatan historis, artikel ini berusaha menjelaskan pandangan Abdolkarim Soroush tentang hubungan antara agama dan politik, khususnya Islam dan demokrasi dengan tema kebebasan, keadilan, sekularisme, dan demokrasi. Hasil yang didapat terkait perbedaan mendasar antara sekularisme politik dan sekularisme filosofis menurut Soroush adalah akar dan tujuannya. Soroush meyakini bahwa sekularisme politik merupakan alternatif dalam menyelesaikan problem antara agama dan politik, baik di dalam masyarakat religius maupun masyarakat non-religius atau masyarakat sekular. Terkait dengan demokrasi, Soroush menilai demokrasi adalah teori anti-tirani. Sedangkan tentang keadilan, ia menganggap keadilan memiliki akar dalam ajaran Islam dan menjadi dasar dalam kehidupan politik modern. Dalam hal kebebasan, Soroush memandang kebebasan bersifat dinamis. Soroush membagi konsep kebebasan menjadi politik dan filosofis, dalam dimensi politik kebebasan identik dengan demokrasi.

Kata-kata Kunci: *Demokrasi, Filsafat Politik, Keadilan, Kebebasan, Sekularisme.*

Pendahuluan

Dalam wacana filsafat politik, ide-ide tentang kebebasan, keadilan, demokrasi, dan sekularisme adalah tema utama yang terus dipercakapan mulai dari era klasik sampai era modern. Saat ini, dalam dunia Islam terjadi ketegangan antara agama dan politik, khususnya demokrasi dan Islam. Ketegangan ini melahirkan perdebatan dialektis yang dinamis, baik secara teoritis mau pun praktis ditengah kalangan para pemikir dalam dunia Islam, Salah satunya adalah perdebatan pemikiran politik filosofis yang terjadi di Iran, pasca revolusi. Gagasan relasi agama dan politik, khususnya relasi Islam dan demokrasi yang mensyaratkan kebebasan dan keadilan menjadi wacana politik filosofis yang sedang dan terus berlangsung. Tokoh utama yang menjadi garda depan dalam membangun relasi agama dan politik yang berbasiskan pada kebebasan dan keadilan adalah Abdolkarim Soroush.

Dalam wacana teori politik yang berkembang terutama di Islam,

paling tidak ada tiga landasan teori yang digunakan oleh banyak negara Islam dalam system pemerintahannya. Landasan politik yang dimaksud adalah teori politik yang berasal dari Barat, teori dari Ahlussunnah wal Jama'ah, dan teori politik dari Syi'ah. Setiap teori politik tersebut terus mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan zaman dan kondisi atau situasi negara yang mengadopsinya (Amrizal 2020, 319).

Menurut Mulyadi (Mulyadi 2019, 50), Abdul Karim Soroush adalah salah satu pewaris sekaligus seorang pembaharu peradaban Persia layaknya Murtadha Muthahhari dan Ali Syariati. Jika Syariati dikenal sebagai seorang teoritis dalam revolusi agama, Soroush dikenal karena teori revolusinya dalam membentuk pluralism agama dan hubungan politik dengan agama. Ia juga merupakan seorang revolusioner Iran. Berbeda dengan Syariati, Soroush melakukan revolusi bukan untuk mengubah dunia, tetapi untuk mengenali dan melakukan pendekatan kritis rasional dan kompleksitas dalam kehidupan beragama di zaman modern. Soroush memiliki keberanian untuk melawan otoritas keagamaan yang selama ini dianggap suci.

Abdolkarim Soroush memiliki ragam pemikiran politik yang cukup luas dengan pelbagai tema dalam filsafat politik. Mahmoud Sadri, seorang penerjemah pemikiran Abdolkarim Soroush menjelaskan bahwa filsafat politik Abdolkarim Soroush begitu dekat dengan tradisi pemikiran liberal. Sadri menyatakan, "*pandangan filsafat politik Soroush dekat dengan jantung tradisi liberal, selalu memperjuangkan nilai-nilai dasar nalar, kebebasan, dan demokrasi*" (Sadri 2001, 259).

Artikel ini akan membahas pemikiran filsafat politik Abdolkarim Soroush yang terkait dengan tema-tema kebebasan, keadilan, sekularisme politik, dan demokrasi. Metode penelitian penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian terhadap buku-buku di perpustakaan yang ada kaitannya dengan tema yang diteliti. Karena kajiannya menyangkut seorang tokoh yang terkenal dalam pemikiran filsafat politik Islam, maka kajiannya termasuk studi tokoh, yaitu kajian terhadap tokoh tertentu untuk mengetahui pemikiran kritisnya tentang pemikiran kritis seorang tokoh mengenai masalah tertentu pada masa tertentu pula. Karena itu pendekatannya pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu merekonstruksi pemikiran kritis seorang tokoh mengenai obyek tertentu dengan melihatnya sebagai realitas yang memiliki kesatuan dengan waktu, tempat, sosial budaya,

dan lingkungan yang mengitarinya. Pendekatan ini dimaksudkan sebagai proses penelitian secara kritis berdasarkan referensi aktual. Untuk memulainya dijelaskan terlebih dahulu latar belakang intelektual Abdolkarim Soroush sebagai tokoh yang diteliti.

Biografi Intelektual Abdolkarim Soroush

Soroush adalah salah satu pemikir Iran yang memperoleh perhatian yang besar dari dunia Internasional. Ia bahkan mendapat julukan "*Luther of Islam*" dan karyanya disamakan dengan Gadamer. Tahun 2004 Soroush mendapat penghargaan *Erasmus Prize* untuk kategori *Religion and Modernity*, bersama dengan Sadiq al-'Azam (Syria) dan Fatema Mernisi (Marocco). ("Erasmus Prize 2004 awarded to: Abdolkarim Soroush" 2004.)

Ia lahir di Teheran pada 10 Muharram/16 Desember tahun 1945. Nama Abdul Karim Soroush adalah nama pena dari Hossein Haj Farraj Dabbagh. Nama pena tersebut sesungguhnya diambil dari nama masa remaja ketika ia mulai menulis puisi. Abdul Karim artinya "Hamba Tuhan" (*the servant of God*), sedangkan Soroush bermakna "*angel of revelation*" (malaikat penyampai wahyu) (Wright 1997, 1).

Pada masa kanak-kanak Soroush sangat menyukai puisi. Penyair yang paling disukainya adalah Sa'di. Soroush mengenal Sa'di dari ayahnya yang biasa membaca syair-syair Sa'di dengan suara keras usai melakukan shalat subuh. Kelak, gaya puisi Sa'di ini mempengaruhi gaya penulisan Soroush di kemudian hari. Soroush menempuh pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) di sebuah perguruan swasta yang diabdikan untuk mengembangkan pemikiran agama. Sekolah itu bernama SMU 'Alavi. Kepala Sekolah itu adalah Bapak Reza Rouzbeh yang memperoleh gelar Master dalam bidang ilmu fisika, juga menguasai dengan sangat baik ilmu-ilmu keagamaan tradisional maupun sains modern. Setelah menamatkan Sekolah Menengah Atas (high school), ia menempuh pendidikan ilmu Farmasi (*Pharmacology*) di Universitas Teheran. Pada waktu yang sama, ia juga mempelajari sastra Persia, puisi, filsafat, dan mistisisme, khususnya Jalaluddin Rumi (1273). Ia juga memohon pelajaran filsafat Islam kepada Murtadha Muthahhari, dan Muthahhari kemudian mengarahkan Soroush untuk belajar kepada murid yang ditunjuk Murtadha Muthahhari (Soroush 2002, 2-3).

Pada tahun 1973, ia melanjutkan pendidikan tinggi dalam program

Master Kimia analitis di University of London, dan setelah tamat ia melanjutkan belajar dalam bidang sejarah dan filsafat ilmu di Chelsea College di London (Tabrizi 2004, 514).

Selama tinggal di London, Soroush aktif berpartisipasi dalam perkumpulan politik mahasiswa Iran di Eropa dan Amerika. Ia sering menyampaikan ceramah-ceramah yang kemudian ditranskrip menjadi famplet atau buku, di antaranya *Falsafah-i Tarikh (Philosophy of History)*, dan *‘Ilm Chist? Falsafah Chist? (What is Science, What is Philosophy)*. Buku lain yang dipublikasikan adalah *Tadadd-i Dialiktiki (Dialectical Antagonism)* yang merupakan kumpulan ceramahnya dalam upaya mengurangi pengaruh ideologi Marxis di kalangan aktivis muda. Buku ini secara luas beredar juga di Iran dan efektif melawan dogma ideologi Marxis. Masih di London, Soroush juga menulis sebuah buku dengan judul *Nahad-i Na Aram-i Jahan (The Restless Nature of the Universe)*. Buku ini mempresentasikan pendekatan filosofis pada dua fundamen ajaran Islam, yakni *Tawhid dan Ma’ad* berdasarkan ide Mullā Ṣadrā tentang *hakat-i jawhari (quintessential motion)*. Buku ini mendapat apresiasi dari Ayatullah Khomeini dan Ayatullah Muthahhari (Jahanbakhsh 1997, 242–243).

Pasca revolusi Iran, Soroush adalah salah satu dari ribuan intelektual muda yang kembali ke Iran. Ia masih terlibat aktif dalam gerakan intelektual. Ia memberikan pelbagai kuliah dengan topik yang bervariasi seputar agama dan masyarakat. Termasuk serangkaian kuliah tentang Rumi’s Mathnawi yang setiap minggu disiarkan oleh televisi di Iran. Ia juga mempublikasikan sebuah buku mengenai filsafat etika yang berjudul *“Danish wa Arzish” (Knowledge and Value)*. Pada masa yang sama, Ia juga menyampakan ceramah tentang ideologi dogmatis Marxisme yang kemudian dibukukan dengan judul *“Dugmatism-i Niqabdar” (The Masked Dogmatism)* (Jahanbakhsh 1997, 244). Soroush menganggap ideologi Marxisme sebagai *“masked dogmatism”* (dogmatisme bertopeng) yang terbungkus sentimen emansipasi dan kebebasan (Tabrizi 2018, 224).

Pada September 1979, setelah beberapa bulan pasca revolusi, Soroush kembali ke Iran. Ia ditempatkan di Departemen Kebudayaan Islam di Institut Keguruan di Teheran. Kemudian, ia diangkat langsung oleh Imam Khomeini menjadi salah satu dari tujuh orang anggota Komite Revolusi Kebudayaan yang bertugas melakukan perombakan kurikulum di seluruh universitas yang terdapat di Iran (Soroush 2002, 13–14).

Ketika ditanya dalam sebuah wawancara tentang perannya dalam Anggota Komite Revolusi Kebudayaan, Soroush menjawab, *“Komite Revolusi Kebudayaan dibentuk dengan tujuan membuka kembali universitas-universitas, bukan menutupnya”*. Soroush berpendapat bahwa Komite Revolusi Kebudayaan dibentuk dan ditugaskan Imam Khomeini untuk membuka kembali universitas-universitas, bukan malah menutupnya (Soroush 2007).

Kiyan adalah jurnal intelektual yang lahir setelah *Kayhan farhangi (cultural universe)* di mana Soroush dan kolega sepemikirannya menuangkan ide-idenya yang terkadang kontroversial dan mendapat respon koersif oleh yang menentanginya, khususnya pihak pemerintah yang kemudian membredel jurnal tersebut. Ketika *Kiyan* ditutup, Soroush mengatakan:

“Mereka merampas sebuah jendela bacaan yang menghasilkan udara dan cahaya pengetahuan. Saya ingin memberi tahu Lembaga Kebudayaan Negara bahwa cara mereka melakukan pelarangan penerbitan artikel sama dengan pembunuhan. Kita membaca dalam Al-Qur’an bahwa jika orang tak bersalah dibunuh, itu seolah-olah sama dengan membunuh banyak orang. Melarang jurnal sama dengan melarang sekolah; itu sama dengan membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya” (Soroush 2007).

Pada tahun 1994 dan 1995 Soroush menerbitkan artikel dengan tema sebagai berikut: *“Religious Democratic Government”*, *“Our Expectations of Religion”*, *“Maximalist Religion, Minimalist Religion”*, *“Ideologized Religion and Religious Ideology”*, dan *“Religious Pluralism”*. Seluruh topik artikel tersebut mempertanyakan pemahaman ideologis agama dan cengkeram totaliternya pada kekuasaan politik (Jahanbakhsh 1997, 249). Artikel-artikel tersebut membuat otoritas politik di Iran tidak nyaman.

Sejak akhir tahun 1998, Soroush mulai mengalami kesulitan untuk bekerja di Iran, karena alasan itu ia mulai menerima undangan untuk mengajar di Universitas Barat seperti Harvard dan Princeton di Amerika, Wissenschaftskolleg di Berlin, juga di Free University Amsterdam dan International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) di Leiden, Belanda.

Dalam perjuangan intelektual dan politiknya, Abdolkarim Soroush tidak pernah mengejar posisi kekuasaan. Dalam sebuah wawancara ia menyatakan:

“saya tidak pernah mencari posisi di pemerintahan. Almarhum Bahonar

pernah menawarkan jabatan Menteri Pendidikan Tinggi di pemerintahan Raja'i, tetapi saya tidak menerima. Juga, ketika Menteri Pendidikan Tinggi (Mo'in) mencalonkan saya sebagai Direktur Utama Akademi, sekali lagi, saya tidak menerima, dan saya sama sekali tidak mencari posisi seperti itu. Satu-satunya jabatan resmi yang pernah saya pegang adalah anggota di Institute Revolusi Kebudayaan yang merupakan penunjukan oleh Imam Khomeini, dan saya menerimanya sebagai pelayan budaya, itu saja" (Soroush 2008).

Petualangan intelektual Soroush yang sangat kosmopolit, juga ditunjang dengan pendidikan yang berakar dari sumber Islam klasik dan filsafat Barat modern mampu membuat Soroush menjadi seorang intelektual ensiklopedis yang memiliki pengetahuan yang mendalam dan mampu berpikir kritis. Wacana dan pemikiran yang dikembangkannya tertuju pada upaya untuk menjembatani hubungan antar agama, kemanusiaan, sains, dan institusi publik di era modern. Soroush beruaha mereformasi wacana keagamaan dalam konteks masyarakat Islam modern (Purnama 2016, 34).

Sosok dan pemikiran Sorouhs yang kontroversial mendapatkan beragam tanggapan baik pro maupun kontra dari berbagai kalangan, baik di Iran atau di luar negeri. Salah satu pemikiran Soroush yang dianggap menginspirasi adalah gugatannya terhadap otoritas tradisi dan agama. Meski begitu, pemikiran ini tidak menolak mentah-mentah tradsionalitas. Hal inilah yang membuat banyak pengkaji perkembangan Islam kontermporer tertarik untuk mengkaji pemikiran Soroush (Mas'udah 2018, 5; Wahidah dan In'ami 2020, 1).

Tokoh-tokoh yang Mempengaruhi Soroush

Banyak pemikir seperti Murtadha Muthahhari (1920–1979), Muhammad Iqbal (1876–1938), 'Ali Syari'ati (1933–1977), dan Mehdi Bazargan (1907–1995) mempengaruhi pemikiran Soroush (Fletcher 2005, 531).

Tokoh yang mempengaruhi Abdolkarim Soroush dalam merekonstruksi pemikiran Islam adalah Muhammad Iqbal. Terinspirasi Muhammad Iqbal, Soroush menyerukan rekonstruksi pemikiran Islam melalui perbaikan mendasar dari perangkat intelektual lama filsafat, teologi, dan hukum Islam (Sadri t.t.).

Tokoh dari pemikir Barat yang paling mempengaruhi Abdolkarim Soroush adalah Karl Popper. Soroush mengatakan, *"filosof sains pertama yang saya kenal pemikirannya adalah Karl Popper, yang pada saat itu*

sudah pensiun, tetapi para pemikir didikannya sangat berpengaruh seperti Profesor Post dari Chelsea College yang mengajar filsafat sains." Nama pemikir Barat lain yang mempengaruhi Soroush antara lain: Paul Feyerabend, Imre Lakatos, dan Pierre Durhem (Soroush 2000, 9).

Soroush sangat mengagumi Karl Popper sebagai filosof sains dan filosof ilmu sosial. Soroush menyatakan bahwa Popper memegang otoritas tinggi dalam filsafat sains dan akan memiliki nama abadi dalam sejarah filsafat sains. Popper adalah campuran antara Hume dan Kant. Soroush memandang Popper merupakan seorang filsuf yang sangat berguna bukan hanya untuk mengkritik Marxisme dan untuk mengurai beberapa kebingungan logis dan filosofis, melainkan juga untuk hal yang berhubungan dengan metafisika. Soroush mengakui bahwa Karl Popper adalah ahli filsafat seperti Kant yang ia kagumi sampai sekarang. Karya Karl Popper dalam filsafat sosial, *The Open Society and Its Enemies* sangat diapresiasi oleh Soroush. Ia menyatakan serangan Popper terhadap Marxisme dalam buku itu sama dengan serangan al-Ghazali terhadap filsafat Islam yang membuat filsafat Islam itu tak bisa tegak lagi di dunia Islam, begitu juga kritik Popper membuat Marxisme tidak bisa tegak lagi di dunia Barat (Soroush 2008).

Soroush pernah menziarah kubur Spinoza ketika ia berkunjung ke Leiden. Ia menyatakan, "*saya mengunjungi makam Spinoza di pemakaman di Nieuwe Kerk beberapa kali ketika saya tinggal di Leiden*" (Bramming 2009).

Namun di atas semua itu, yang paling mempengaruhi hidup Abdolkarim Soroush menurut Soroush sendiri adalah Jalaluddin Rumi. Ia mengakui bahwa Maulana Jalaluddin Rumi sangat mempengaruhi hidupnya. "*Jika saya harus berbicara tentang satu orang sebagai model, ia adalah Mawlana Jalaluddin Rumi. Tidak ada yang memainkan peranan besar dalam hidup saya seperti dia*" (Soroush 2008).

Dalam kuliahnya di Stanford University tahun 2011, Soroush menyatakan bahwa *Rumi is my life love* [Rumi adalah cinta dalam hidupku]. Ia menyebut Rumi sebagai Nabi Cinta (*Prophet of Love*) (Soroush 2011). Soroush menulis risalah tentang Rumi secara khusus dengan judul *Mathnawi Ma'navi (Rumi's Mathnawi)*, sebuah edisi baru *Mathnawi Rumi* yang diberi kata pengantar dan koreksi oleh Abdul Karim Soroush. Buku ini terbit pada April 1996, volume 1 sebanyak 540 halaman dan volume 2 sebanyak 571 halaman.

Bagi Soroush, Rumi mengajarkan cinta yang berfungsi untuk membebaskan akal dari sikap rakus (*greed*), sikap mementingkan diri sendiri (*selfishness*), dan banyak penyakit jiwa lainnya. Melalui pembebasan akal dari penyakit-penyakit hati tersebut manusia menjadi manusia bebas (Leezenberg 2007).

Pemikiran Filsafat Politik Abdolkarim Soroush

Filsafat politik bukan merupakan disiplin historis, sekalipun ia tidak bisa mengabaikan dimensi historisnya (Schmandt 2009, 8). Abdolkarim Soroush memiliki ragam pemikiran filsafat politik yang cukup luas dengan pelbagai tema. Mahmoud Sadri, seorang penerjemah pemikiran Abdolkarim Soroush menjelaskan bahwa filsafat politik Abdolkarim Soroush begitu dekat dengan tradisi pemikiran liberal. Sadri menyatakan bahwa pandangan filsafat politik Soroush dekat dengan jantung tradisi liberal, selalu memperjuangkan nilai-nilai dasar nalar, kebebasan, dan demokrasi. Artikel ini akan menguraikan pemikiran filsafat politik Abdolkarim Soroush yang terkait kebebasan, keadilan, sekularisme politik, dan demokrasi. Yang merupakan tema-tema esensial dalam filsafat politik (Mahmoud 2001, 259).

1. Kebebasan

Kebebasan (*freedom*) adalah tema utama dalam kajian filsafat politik. Secara umum, kebebasan didefinisikan sebagai memiliki kemampuan untuk bertindak atau berubah tanpa kendala. Sesuatu itu 'bebas' jika ia dapat berubah dengan mudah dan tidak dibatasi dalam keadaannya saat ini.

Sartre meyakini bahwa eksistensi dan kebebasan adalah identik. Kebebasan adalah tindakan memilih dan manusia bebas dalam menentukan pilihan. Namun kebebasan itu musti bertanggung jawab. Sartre mengatakan bahwa manusia adalah kebebasan (Hadiwijono 1980, 157).

Dalam filsafat politik percakapan tentang kebebasan tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. John Stuart Mill, filsuf Inggris, menganggap terdapat relasi antara kebebasan dan kekuasaan. Dalam bukunya *On Liberty*, ia menyatakan bahwa pertarungan kebebasan dan kekuasaan merupakan ciri yang paling jelas dalam sejarah yang sudah sejak awal kita ketahui dalam sejarah Yunani, Romawi, dan Inggris. Mill menjelaskan kebebasan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap kekejaman

para penguasa politik (Mill 2005, 1-2).

Dalam pandangan Abdolkarim Soroush, seseorang tidak dapat memahami kebebasan dalam masyarakat Islam tanpa kembali kepada filsuf abad pertengahan seperti Al-Farābi, Ibnu Sīnā, atau Ibnu Khaldun. Konsep kebebasan pada masa abad pertengahan tersebut tentu berbeda dengan konsep kebebasan pada masa kini. Konsep kebebasan pada masa abad pertengahan tidak dianggap begitu penting pada masa itu, tidak sepenting pada masa sekarang. Dalam sebuah wawancara Abdolkarim Soroush mengatakan bahwa :

"...seseorang tidak dapat memahami kebebasan dalam masyarakat Islam tanpa kembali ke filsuf abad pertengahan seperti Al-Farabi, Ibn Sina, atau Ibn Khaldun. Konsep kebebasan tidak sepenting saat itu seperti saat ini, katanya" (Fremont 2000).

Soroush membagi konsep kebebasan menjadi politik dan filosofis, eksternal dan internal. Untuk mengetahui konsep kebebasan politik kita musti mengetahui konsep yang berlawanan seperti tirani dan demokrasi. Terkadang, demokrasi digunakan sebagai sinonim bagi kebebasan. Terkait kebebasan filosofis, sebagian melihat kebebasan sebagai suatu hak, yang lainnya melihat sebagai realitas. Soroush menjelaskan:

Hegel melihatnya sebagai tujuan yang dituju oleh jiwa yang sesungguhnya. Sebagian orang berusaha menyelaraskan kebebasan dengan persamaan dan keadilan; sebagian lain berputus asa mencapai maksud ini. Kebebasan telah disamakan dengan pemberontakan maupun penaklukan. Kaum eksistensialis mengidentifikasi kebebasan sebagai esensi kemanusiaan (Soroush 2002, 126-27).

Dalam konteks kebebasan secara filosofis, Soroush mengaitkan kebebasan dengan nalar. Ia menyatakan :

"Kita bersimpati pada kebebasan dan menuntut adanya kebebasan karena kita rasional. Kebebasan dan ketidakbebasan tidak menjadi masalah bagi makhluk yang tidak berakal. Kita tidak bisa berbicara tentang kebebasan bagi malaikat yang lebih mulia daripada manusia, atau bagi binatang yang lebih rendah daripada manusia. Kita bersemangat berkenaan dengan kebebasan dan mempertimbangkannya sebagai bagian hak manusia yang esensial, karena nalar dan kebebasan saling jalin berkelindan. Kehilangan salah satu akan melemahkan eksistensi lainnya. Kebebasan adalah milik manusia yang rasional. Nalar membutuhkan pendamping dekat yang mempunyai kepentingan yang sama: kebebasan" (Soroush 2002, 127).

Kebebasan internal dicapai dengan membebaskan diri dari belenggu nafsu dan amarah. Sedangkan kebebasan eksternal dicapai dengan melepaskan diri dari kekuasaan raja, orang zalim, penipu, dan penindas. Prasyarat untuk mencapai kebebasan eksternal adalah berpartisipasi dalam perjuangan kebebasan, yang merupakan suatu proses publik yang didasarkan pada peraturan dan ketetapan. Memperjuangkan kebebasan berarti melawan para tuan yang bodoh, pembual yang sombong, dan raja yang tidak cakap. Kebebasan menjunjung tinggi tanggung jawab dan keberanian (Soroush 2002, 142).

Soroush memandang orang yang takut pada kebebasan adalah mereka yang mencintai ide-idenya sendiri yang lemah, sedangkan para pecinta kebenaran pasti sangat mencintai kebebasan. Kebebasan boleh jadi menyakiti keyakinan pribadi, tetapi kebebasan tidak mungkin menyakiti kebenaran kecuali bagi mereka yang mau mempribadikan kebenaran mutlak. Tidak seorang pun akan dirugikan oleh kebebasan kecuali mereka yang menderita narsisme (cinta diri) dan megalomania (Soroush 2002, 130).

2. Keadilan

Para filsuf memiliki definisi yang berbeda mengenai keadilan. Dalam sejarah filsafat, perbincangan tentang makna keadilan tergambar dalam karya Plato, *The Republic*, yang merupakan dialog Socrates tentang definisi keadilan. *The Republic* adalah karya Plato yang memuat dialog Socrates tentang konsep kekayaan, keadilan, moderasi, dan para penentangannya (*Of Wealth, Justice, Moderation, and Their Opposites*). Dialog diselenggarakan di rumah Cephalus yang dihadiri banyak penduduk Athena. Narasumber dalam dialog tersebut antara lain Socrates, Cephalus, Glaucon, Thrasymachus, Adeimantus, Cleitophon, Polemarchus (Plato 2018, 17739 – 17742).

Soroush sendiri mendefinisikan keadilan adalah ‘ibu kebebasan’ yang kini absen dalam kehidupan Negara-Negara Dunia Ketiga (*Third World*) yang semua penduduknya meyakini agama. Dalam sebuah pidato penutup dalam *Second Annual Conference*, Soroush menyatakan, “kami di Dunia Ketiga sangat menderita karena tidak adanya kebebasan. Kami telah banyak mengeluh dan menulis, tetapi keadilan belum mendapat perhatian yang cukup. Sekarang saatnya bagi kita untuk mengutamakan konsep keadilan. Keadilan adalah ibu kebebasan” (Soroush 2001).

Keadilan adalah cita-cita sosial yang musti diwujudkan dalam realitas sosial. Dalam Pandangan Soroush keadilan hanya bisa diwujudkan melalui demokrasi. Soroush menegaskan, *“demokrasi adalah cara terbaik untuk mewujudkan keadilan di zaman kita...umat islam memiliki kewajiban untuk berusaha mencapai keadilan. Mereka wajib mencari teori keadilan modern; artinya mereka musti mencari bentuk keadilan yang dapat diwujudkan dalam masyarakat modern”* (Soroush 2006).

Demokrasi adalah manifestasi modern dan pencarian abadi manusia dalam menentang ketidak-adilan dan menuntut keadilan. Namun, keadilan dapat berhasil hanya jika para pencarinya tidak terbebani oleh kemelaratan dan ketidakamanan (Soroush 2002, 62).

Implementasi keadilan hanya bisa diwujudkan melalui demokrasi. Soroush menegaskan saat ini penerapan keadilan, yang juga agama menurutnya hanya dimungkinkan melalui demokrasi, tidak dengan yang lain. Ia mengatakan, *“saat ini, penerapan keadilan, yang juga dituntut oleh agama, hanya dimungkinkan melalui demokrasi, bukan melalui aturan individu, bukan melalui perwalian”* (Soroush 2010).

Menurut pendapat kaum beragama, keadilan adalah prasyarat dan juga syarat bagi kekuasaan agama. Suatu kekuasaan yang tidak adil tidaklah agamis. Keadilan, kemudian, diarahkan untuk memenuhi kebutuhan, mencapai hak-hak, dan menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan. Agama yang benar dan bisa diterima tak pelak lagi haruslah adil (Soroush 2002, 192). Soroush berpendapat bahwa:

Pemerintahan agama harus menjadi pemerintahan yang adil, dan keadilan adalah istilah yang didefinisikan diluar agama. Keadilan agama, berdasarkan fiqh, dan dipahami sebagai interpretasi dan penerapan hukum Al-Qur'an, dapat diturunkan langsung dari Al-Qur'an. Namun, konsep keadilan itu sendiri tidak dapat didefinisikan dengan merujuk pada Al-Qur'an saja. Keadilan mencakup konsepsi tentang manusia, tentang apa artinya menjadi manusia dan hak-haknya. Kita tidak mendefinisikan keadilan dari agama, tetapi kita menerima agama, karena agama itu adil (Vakili 1996).

Dalam konteks keadilan, Soroush juga mengomentari dan mengkaitkannya dengan konteks ketidakadilan dalam hal interpretasi agama yang dianggap otoriter dan memonopoli seakan-akan hanya kelompok tertentu yang berhak atau berwenang untuk melakukan interpretasi terhadap agama. (Setyawan 2017, 153) Soroush berpandangan bahwa dominasi interpretasi agama (fikih) menjadi

sumber utama ketidakadilan secara material, karena hukumnya dikonstruksi dalam bingkai otoriter. Hal ini menyebabkan adanya penafian atas sumber utama yang otoritatif yaitu Al-Qur'an dan hadis, sehingga orang tidak bisa membedakan antara interpretasi dan sumber agama, karena interpretasi sudah diyakini sebagai sebagai agama. Anggapan ini akhirnya berkonsekuensi hilangnya muatan etika seperti anggapan sudah tertutupnya pintu ijtihad dan tidak bisa menghadirkan hukum baru adalah bentuk dari tafsir otoriter. Anggapan seperti itu sebenarnya telah mencederai pemikiran manusia dan menafikan anugerah manusia yang diberikan akal untuk berpikir kritis. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya anggapan sebagian ulama konservatif yang menolak kelompok gerakan rasional, kondisi itu menjadi penguat bahwa agama dan interpretasi agama hanya menjadi wewenang kelompok tertentu saja.

3. Demokrasi

Ide demokrasi bermula dari tradisi politik masyarakat Athena pada zaman Yunani Kuna abad ke-5 SM (Schmandt 2009, 33). Robert A. Dahl dalam bagian pertama bukunya *On Democracy* menjelaskan secara singkat perkembangan demokrasi. Ia menyatakan bahwa demokrasi dibicarakan paling tidak sekitar dua ratus lima puluh tahun belakangan ini (Dahl 1998, 230).

Sejarah demokrasi berjalan sejajar dengan perjalanan sejarah pemikiran manusia. Gagasan demokrasi sama purba dengan pergulatan manusia dalam membentuk tatanan. Namun, para filsuf pada umumnya tidak terlalu antusias dengan gagasan demokrasi, bahkan curiga. Mulai dari Platon, Aristoteles, Kaum Stoa (Cicero, Seneca, Marcus Aurelius), Agustinus, Moses Maimonides, Ibn Rushd, Thomas Aquinas hingga Machiavelli, Kant, Hegel, dan Marx, mereka pada umumnya tidak terlalu percaya dengan demokrasi (Nugroho 2008, 1-63).

Menurut Abdul Karim Soroush, demokrasi ditandai dengan adanya pemisahan kekuasaan, studi tentang kewajiban kepada warga negara umum, kemerdekaan dan otonomi pers, kebebasan berekspresi, dewan musyawarah pada berbagai tingkat pengambil keputusan, partai politik, pemilihan umum dan parlemen. adalah cara untuk mencapai dan menciptakan demokrasi. Ada beberapa pandangan tentang demokrasi dan terkait dengan agama di kalangan pemikir Muslim. Secara umum, terbagi menjadi tiga: kelompok yang menolak demokrasi secara total, pendukung demokrasi murni (nasionalis-sekuler), dan kelompok yang mencoba memadukan antara konsep demokrasi

dan nilai-nilai agama. Dalam pengamatan penulis, Abdul Karim Soroush termasuk ke dalam kelompok ketiga (Azhar 2014, 95).

Demokrasi adalah manifestasi modern dan pencarian abadi manusia dalam menentang ketidak-adilan dan menuntut keadilan. Demokrasi bisa dicapai oleh mereka yang sudah terbebas dari segala bentuk perbudakan lain. Soroush menyatakan, "*demokrasi didambakan oleh kita semua, tetapi dalam kenyataannya demokrasi tidak dapat dijangkau oleh semuanya. Demokrasi mensyaratkan tingkat tertentu pada perkembangan norma, politik, dan pemerintahan yang bergantung pada perkembangan ekonomi*" (Soroush 2002, 62-63).

Demokrasi adalah sistem politik yang tidak memiliki definisi yang akurat. Tidak terdapat konsensus mengenai definisi demokrasi. Bahkan, mencari definisinya di dalam kamus juga tidak membantu, karena definisi demokrasi sangat ditentukan oleh aliran teori politik tertentu. Makna demokrasi yang paling sederhana dan paling umum diterima berasal dari kata Yunani "*demos*" (*people*) dan "*kratia*" (*rule or authority*) menjadi "*the rule by the people*" (aturan oleh rakyat) (Jahanbakhsh 1997, 5).

Konsep demokrasi sering disalahpahami dan disalahgunakan manakala rezim-rezim totaliter dan diktator militer berusaha memperoleh dukungan rakyat. Para filsuf politik telah sering menyatakan bahwa demokrasi bersifat anti tesis terhadap kebebasan dan liberalisme, dengan memahaminya sebagai kediktatoran mayoritas (*Hayek*) atau pemerintahan minoritas atas nama mayoritas (Mill 2005). Walaupun Demokrasi, apa pun definisinya merupakan bentuk pemerintahan sah yang berusaha memangkas ekstrimitas pelanggar hukum yang zalim, demokrasi mendorong untuk membatasi sebagian nafsu mereka untuk mencapai kenyamanan dan kemakmuran. Hukum menentang kebebasan mutlak, tetapi tidak terhadap demokrasi (Soroush 2002, 208).

Meskipun Soroush menolak Islam sebagai ideologi politik, ia tidak menyarankan adanya pemilahan agama dan politik. Soroush justru berpandangan bahwa dalam konteks masyarakat religius, maka politik pun akan mengambil bentuk religius. Orang-orang dalam masyarakat religius dengan sendirinya akan memmanifestasikan perasaan religius yang mereka anut ke dalam politik. Jika suatu sistem politik mengakomodir opini dan partisipasi publi, maka system itu akan mewujudkan perasaan religius tersebut. Perhatian dan pertanyaan Soroush bukan pada aspek

kesesuaian agama dan politik, tetapi pada aspek interaksi antara agama dan politik. Soroush mendekati isu pemerintahan religius dengan mengajukan pertanyaan dalam konteks masyarakat religius apakah agama memiliki hak untuk memerintah? Jika iya, maka siapakah yang memiliki hak tersebut? Dalam menjawab pertanyaan ini, Soroush mendekatinya dengan pertimbangan fikih dan kalam (Fadoil 2013, 446). Untuk menghubungkan antara agama dan demokrasi, Soroush setidaknya menghadirkan tiga cara:

Pertama, melakukan rekonsiliasi agama dan demokrasi yang dinilai Soroush sebagai contoh kecocokan agama dan akal. Akal begitu sentral dalam menumbuhkan demokrasi agama. Seperti yang dikatakan Soroush, prasyarat demokratisasi pemerintahan agama adalah menggunakan konteks sejarah dan memberdayakan pemahaman agama yang menekankan peran akal. Alasan yang dimaksud adalah alasan kolektif yang muncul dari partisipasi publik dan pengalaman manusia dalam menggunakan metode demokrasi. Prinsip kedua menyebutkan bahwa rekonsiliasi agama dan demokrasi menunjukkan kecerdasan meta-religious artifice yang memiliki epistemologi dimensi ekstra-religius. Artinya, agama berbicara tentang "demokrasi". Maksudnya, masalah demokrasi termasuk objek pemikiran dan kajian Islam. Ketiga, pemahaman agama harus beradaptasi dengan kenyataan bahwa demokrasi telah berhasil membatasi kekuasaan, mencapai keadilan, dan mendapatkan hak asasi manusia. Artinya, agama harus menerima pencapaian tersebut untuk memahami dan menerima demokrasi. Keempat, hak arbitrase (pemecahan masalah) disampaikan kepada kearifan publik yang dinamis yang berkaitan dengan agama. Kelima, pemahaman bahwa agama berubah, bersifat rasional, dan selaras dengan kriteria umum non-keagamaan diterima untuk memutuskan persoalan-persoalan pemerintahan yang demokratis keagamaan. Keenam, tanpa masyarakat yang religius, pemerintahan yang demokratis tidak dapat digagas (Susanto 2011, 261-262).

4. Sekularisme Politik

Sekularisme adalah hasil dari rasionalisasi dan revolusi sains modern. Pengetahuan sains modern telah mengubah bukan saja pandangan manusia tentang dunia, melainkan juga pandangannya tentang kemampuan dan posisinya sendiri di dalamnya. Menurut Soroush, revolusi yang terjadi dalam ilmu pengetahuan alam telah menjangkau ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan ilmu politik merupakan sekularisasi. Sekularisme, dalam pengertian ini, tidak lain adalah "saintifikasi" dan rasionalisasi pemikiran terhadap pertimbangan sosial dan politik (Soroush 2002, 80).

Soroush memandang sains modern menjelaskan dunia seolah-olah

tidak diciptakan oleh dewa. Sains memang tidak menyangkal keberadaan dewa, tetapi tidak merasa perlu menjadikannya sebagai dalil. Dengan kata lain, ada asumsi bahwa meskipun ada dewa, sains tetap dapat menjelaskan dunia tanpa mengandalkan eksistensinya. Dewasa ini, sains tampaknya telah menimbulkan pengaruhnya pada perilaku individu dan tata cara pemerintahan (Soroush 2002, 177). Perkembangan sains inilah yang memicu lahirnya sekularisme dalam kehidupan duniawi.

Dalam pandangan Soroush ketika kita berbicara sekularisme terdapat tiga konsep yang saling berhubungan: modernisasi, sekularisasi, dan reformasi. Modernisasi adalah suatu proses pengembangan dan pembedaan progresif dari institusi-institusi dan lingkungan kehidupan di bawah pengaruh kemajuan ekonomi dan teknologi yang terkait dengan kemunculan kapitalisme. Sekularisasi adalah satu contoh modernisasi yang membedakan agama dari institusi ekonomi dan politik, yakni pemisahan gereja dan negara. Sekularisasi juga dapat berarti pemisahan agama dari budaya dan hati nurani. Ada pun reformasi adalah upaya umat beragama dalam mengantisipasi, menyesuaikan, atau merespon perubahan yang terjadi terkait dengan sekularisasi (Soroush 2002, xiii).

Sekularisasi mempunyai aspek sosio-politik dan psikologi budaya. Makna orisinal istilah sekularisasi, yaitu, “penghapusan wilayah kekuasaan dari kendali wewenang rohaniawan”, ini menunjukkan pemisahan institusi gereja dan agama. Tahap ini dikenal sebagai sekularisme objektif. Sedangkan sekularisme subjektif adalah profanasi menyangkut kebiasaan kultural dan persepsi personal oleh hal-hal yang profan (duniawi) (Soroush 2002, xiv-xv). Pandangan ini kemudian dikenal sebagai sekularisme.

Dalam pandangan Soroush, sekularisme telah dipahami sebagai upaya sengaja untuk mengeluarkan agama dari urusan-urusan dunia. Sekularisme muncul dari dua sumber: pertumbuhan sains modern dan rasionalitas serta perubahan-perubahan yang mendalam pada makna dan hubungan antara hak dan kewajiban (Soroush 2002, 79).

Dalam percakapan tentang sekularisme, Soroush mengungkapkan ada perbedaan mendasar antara sekularisme politik (*political secularism*) dan sekularisme filosofis (*philosophical secularism*). Kerancuan dalam

mendefinisikan keduanya menimbulkan pertengkaran. Perbedaan mendasar antara sekularisme politik dan sekularisme filosofis adalah sekularisme filosofis berakar pada materialisme, sedangkan sekularisme politik melihat dunia masih dalam kehendak Tuhan.

Dalam sebuah wawancara, Soroush menjelaskan perbedaan mendasar antara sekularisme politik dan sekularisme filosofis tersebut:

Secara umum, kita memiliki dua jenis sekularisme: sekularisme politik dan sekularisme filosofis. Sekularisme politik berarti kita memisahkan agama secara institusi dari politik. Dan negara menganggap semua kepercayaan dan agama adalah sama, mengakui kemajemukan agama dan memperlakukannya secara imparial. Dalam pengertian ini, banyak orang beragama menganut sekularisme politik dan menyetujui imparialitas politik semacam ini di hadapan beragamanya kepercayaan (Soroush 2019).

Dalam hal sekularisme filosofis, Soroush menolaknya dengan argumen:

"Kita memiliki sekularisme lain yang dikenal sebagai sekularisme filosofis. Ini identik dengan atheisme dan kekurangpercayaan pada agama. Ini adalah semacam materialisme. Jenis sekularisme ini tidak bisa dikombinasikan dengan pemikiran keagamaan. Yang satu bergantung pada penegasan agama (sekularisme politik), dan yang satu lagi bergantung pada penolakan agama (sekularisme filosofis), dan menggabungkan penegasan dan penolakan adalah tidak mungkin" (Soroush 2019).

Sekularisme politik memiliki dua pilar, yakni: masalah legitimasi dan netralitas sistem politik dari agama dan mazhab pemikiran teoritis. Soroush mengatakan, "saya percaya bahwa legitimasi sistem bergantung pada keadilan, bukan pada jenis agama tertentu, dan sistem yang diterima berasal dari rakyat. Sedangkan mengenai netralitas negara terhadap berbagai agama dan kepercayaan adalah semua orang memiliki hak yang sama" (Soroush 2006). Menurut Soroush, sekularisme politik menuntut pengakuan pluralisme agama dan prinsip netralitas negara. Kesalahpahaman terhadap sekularisme politik juga terjadi di Iran. Dalam sebuah wawancara, Soroush berkomentar:

"Masalah yang muncul, terutama di antara orang-orang Iran yang ekspatriat, adalah bahwa banyak dari orang-orang yang mengatakan mereka sekuler juga sekuler dalam kepercayaan mereka. Dengan kata lain, mereka tidak percaya pada spiritualitas dan agama. Tentu saja, mereka bebas menjadi seperti ini. Tetapi ketika mereka berbicara untuk membela sekularisme, sekularisme memiliki perasaan yang menakutkan bagi orang-orang Iran di

negara mereka. Artinya, mereka berpikir bahwa menyerukan sekularisme berarti meninggalkan kepercayaan dan religiusitas mereka. Kesalahan dan ilusi ini harus diperbaiki” (Soroush 2010).

Soroush menyatakan kekeliruan terbesar dari mereka yang mengaku sekularis adalah mereka juga sekular dalam keimanan. Dengan kata lain, mereka tidak percaya pada agama dan spriritualitas. Kekeliruan kebanyakan orang menganggap bahwa menyerukan sekularisme berarti meninggalkan keimanan dan religiusitas. Kesalahan dan ilusi ini tentu musti diperbaiki.

Jadi, Soroush meyakini bahwa sekularisme politik adalah pilihan yang tepat dalam menjalankan negara. Sekularisme politik tidak menolak sipritualitas dan agama. Tidak seperti sekularisme filosofis yang menyingkirkan dan curiga pada spritualitas dan agama. Ia menganggap sekularisme politik memberikan masa depan yang cerah bagi relasi agama dan kekuasaan.

Dalam prakteknya di dunia, sekularisme bukanlah sesuatu yang yang dirancang atau direkomendasikan terlebih dahulu oleh individu atau pun kelompok. Soroush berpendapat bahwa sekularisme yang dipaksakan seperti sekularisme Turki pada zaman Kemal Attaturk mengalami kegagalan. Pengalaman Eropa menunjukkan bahwa sekularisme terjadi akibat konsekuensi logis dari bentrokan antara agama dan sains. Soroush mengatakan, *“pemisahan agama dan politik itu terjadi secara alamiah”* (Soroush 2007).

Soroush mengingatkan bahwa pemerintahan sekular jangan didefinisikan hanya dengan apa yang sebenarnya bukan indentitasnya, yakni pemerintahan non-agama, melainkan dengan apa yang sebenarnya, yakni satu pemerintahan yang siap dikritik, diperiksa, dan disesuaikan. Soroush menyatakan:

“Jadi, kita bisa mendefinisikan sekularisme sebagai suatu rezim yang pemerintahannya tidak mempunyai nilai atau kaidah-kaidah yang berada di luar penilaian atau verifikasi manusia, dan tidak ada protokol, status, posisi, atau ordonansi yang tidak bisa diawasi publik. Segala sesuatu terbuka terhadap kritik, dari kepala negara hingga tata cara pemerintahan dan arah penentuan kebijakan. Inilah makna sekularisme. Sebenarnya, ketika politik tidak disakralkan (yaitu, ketika politik menjadi rasional dan ilmiah), sedangkan agama disakralkan, keduanya terpisah. Inilah makna dan alasan pemisahan agama dan negara di masyarakat secular” (Soroush 2002, 83-86).

Kesimpulan

Dari uraian di atas paling tidak kita bisa dapat menarik beberapa kesimpulan mengenai pemikiran filsafat politik Abdolkarim Soroush tentang kebebasan, keadilan, demokrasi, dan sekularisme, antara lain:

Menurut Soroush, perbedaan mendasar antara sekularisme politik dan sekularisme filosofis adalah sekularisme filosofis berakar pada materialisme, sedangkan sekularisme politik melihat dunia masih dalam kehendak Tuhan. Ia menolak sekularisme filosofis karena identik dengan atheisme dan tidak percaya pada agama. Soroush menyakini sekularisme politik dan mengklaim sebagai penganutnya. Ia meyakini bahwa sekularisme politik merupakan alternatif dalam menyelesaikan problem antara agama dan politik, baik di dalam masyarakat religius maupun masyarakat non-religius atau masyarakat sekular. Soroush menilai demokrasi adalah teori anti-tirani yang memiliki cara memerintah 'yang berorientasi pada hak' (*right oriented people*) dan menggunakan 'sistem manajemen yang rendah kesalahan' (*low-error system of management*). Keduanya adalah prinsip dalam negara demokratis. Selain itu, Soroush memandang bahwa demokrasi terdiri dari metode membatasi kekuasaan para pemimpin dan merasionalkan pertimbangan dan kebijakan mereka, sehingga mereka tidak begitu rentan terhadap kesalahan dan korupsi, terbuka untuk menerima nasihat, moderasi, musyawarah, dan karenanya kekerasan dan revolusi tidak akan diperlukan. Abdolkarim Soroush memandang konsep keadilan memiliki akar dalam ajaran Islam. Keadilan juga menjadi dasar kehidupan politik modern. Sayangnya, menurut Soroush keadilan adalah 'ibu kebebasan' yang kini absen dalam kehidupan Negara-Negara Dunia Ketiga (*Third World*) yang semua penduduknya meyakini agama. Soroush memandang kebebasan bersifat dinamis. Kebebasan pada masa lalu (Abad Pertengahan) dianggap tidak begitu penting, tidak seperti kebebasan pada masa kini. Soroush membagi konsep kebebasan menjadi politik dan filosofis, dalam dimensi politik kebebasan identik dengan demokrasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Amrizal, Amrizal. 2020. "Wilayatul Faqih: Landasan, Implementasi, dan Kritik." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 6 (2): 318–53. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v6i2.1627>.
- Azhar, Muhammad. 2014. "The Concept Of Religious Democracy As A New Political Philosophy For Moslem Countries." Dalam *Book of Conference Proceedings International Conference on ITMAR*, 1:94–99. Istanbul: Globalilluminators. <https://www.globalilluminators.org/wp-content/uploads/2014/12/ITMAR-14-150.pdf>.
- Bramming, Pernille. 2009. "Iran: We Want A Religious Democracy! Leading Iranian Reformist Abdolkarim Soroush defends former President against a Danish rebellion." Diakses 4 Januari 2020. http://www.drSORoush.com/PDF/Soroush_WA2009-12-23_Bramming_English.pdf.
- Dahl, Robert A. 1998. *On Democracy*. London: Yale University.
- "Erasmus Prize 2004 awarded to: Abdolkarim Soroush." 2004. Diakses 28 Juli 2019. http://www.drSORoush.com/English/News_Archive/E-NWS-20040400-Erasmus_Prize_2004_awarded_to_Abdolkarim_Soroush.html.
- Fadoil, M. Heri. 2013. "Konsep Pemerintahan Religius dan Demokrasi Menurut Abdul Karim Soroush dan Ayatullah Khomeini." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 3 (2): 438–73. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.2.438-473>.
- Fletcher, Charles D. 2005. "The Methodology of Abdolkarim Soroush: A Preliminary Study." *Islamic Studies* 44 (4): 527–52.
- Fremont, Romain. 2000. "Islamic Democracy and Islamic Governance A summary of remarks by Abdolkarim Soroush and Charles Butterworth at The Middle East Institute." Diakses 20 Maret 2020. https://www.drSORoush.com/English/By_DrSORoush/E-CMB-20001121-Islamic_Democracy_and_Islamic_Governance.html.
- Hadiwijono, Harun. 1980. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jahanbakhsh, Forough. 1997. "Islam, Democracy, Modernism in Iran (1953-1997): From Bazargan to Soroush." Canada: Institute of

Islamic Studies McGill University, Montreal.

- Leezenberg, M. 2007. Interview Soroush: Enlightenment & Philosophy in Islam. *Isim Review* 20 (1), 36-37. <https://hdl.handle.net/1887/17190>.
- Mahmoud, Sadri. 2001. "Sacral Defense of Secularism: The Political Theologies of Soroush, Shabestari, and Kadivar." *International Journal of Politics, Culture and Society* 15 (2).
- Mas'udah, Al Mas'udah Al. 2018. "Agama dan Pemikiran Keagamaan (Membedah Teori Abdulkarim Soroush Tentang Qabdh Wa Bast)." *Jurnal Al Himayah* 2 (1): 1-16.
- Mill, John Stuart. 2005. *On Liberty*. Diterjemahkan oleh Alex Lanur. Jakarta: Yayasan Obor.
- Mulyadi, Mulyadi. 2019. "Pemerintahan, Demokrasi, dan Interpretasi Agama dalam Perspektif Abdul Karim Soroush." *Jurnal Filsafat* 29 (1): 49-65. <https://doi.org/10.22146/jf.34355>.
- Nugroho, Ito Prajna. 2008. "Demokrasi di Antara Legitimasi dan Delegitimasi." Dalam *Seminar Nasional Pusat Pengkajian Pancasila*. Malang: Universitas Negeri Malang.
- Plato. 2018. *Plato: The Complete Works*. Diterjemahkan oleh Benjamin Jowett. ATOZ Classics.
- Purnama, Fahmy Farid. 2016. "Liberasi Teologi di Iran Pasca-Revolusi: Telisik Pemikiran Abdul Karim Soroush." *Jurnal Theologia* 27 (1): 25-50. <https://doi.org/10.21580/teo.2016.27.1.923>.
- Sadri, Ahmad. t.t. "Soroush, Abdolkarim." The Oxford Encyclopedia of the Islamic World. Diakses 5 Oktober 2020. <http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e0978>.
- Schmandt, Henry J. 2009. *Filsafat Politik; Kajian Historis dari Zaman Yunani Kuno Sampai Zaman Modern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setyawan, Cahya Edi. 2017. "Kritik Abdul Karim Soroush Atas Sistem Al-Faqih: Teks Agama, Interpretasi dan Demokrasi." *FIKRAH* 5 (1): 151-74. <https://doi.org/10.21043/fikrah.v5i1.2258>.
- Soroush, Abdulkarim. 2001. "Reason & Freedom in Islamic Thought." Dalam *The CSID 2nd Annual Conference*. Washington, D.C.: Georgetown University. Diakses 5 Februari 2020. <http://www>.

- drsoroush.com/English/By_DrSoroush/E-CMB-20010407-Reason_Freedom_in_Islamic_Thought.html.
- . 2002. *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*. Diterjemahkan oleh Abdullah Ali. Bandung: Mizan.
- . 2006. I am not the Reformists' Godfather Diwawancara oleh Reza Khojasteh Rahimi. Diakses 17 November 2019. <http://www.drSORoush.com/English/Interviews/E-INT-IAMNotTheReformistsGodfather.html>.
- . 2007. Khatami's Election Victory was Detrimental to Kiyān Diwawancara oleh Reza Khojasteh Rahimi. Diterjemahkan oleh Nilou Mobasser. Diakses 14 November 2019. <http://www.drSORoush.com/English/Interviews/E-INT-Kian.html>.
- . 2007. One Cultural Revolution was Enough Diwawancara oleh Matin Ghaffarian. Diterjemahkan oleh Mobasser Nilou. Diakses 15 November 2019. <http://www.drSORoush.com/English/Interviews/E-INT-One%20Cultural%20Revolution%20was%20Enough.html>.
- . 2007. An Interview with Abdolkarim Soroush: Amsterdam Debate Diwawancara oleh Matin Ghaffarian. Diakses 13 Desember 2019. <http://www.drSORoush.com/English/Interviews/E-INT-Amsterdam%20Debate.html>.
- . 2008. Alas, I've Missed the Chance to have Coffee with Popper Diwawancara oleh Reza Khojasteh Rahimi. Diterjemahkan oleh Nilou Mobasser. Diakses 19 November 2019. <http://www.drSORoush.com/English/Interviews/E-INT-10-10-2008-Poper.html>.
- . 2010. The Current Iranian System Rests on Obedience not Human Rights Diwawancara oleh Nooshabeh Amiri. Diakses 27 Maret 2020. <https://www.drSORoush.com/English/Interviews/E-INT-20100300-The%20CurrentIranianSystem.html>.
- . 2011. Rumi The Prophet of Love. Stanford University. http://lectures.drSORoush.com/English/Lectures/2011.05.23_Stanford_ProphetOfLove_Khordad_2_1390.mp3
- . 2019. Interview with Abdolkarim Soroush: We Must Have a Referendum in Iran Diwawancara oleh Farzaneh Bazrpour. <http://>

www.drSOROUSH.com/English/Interviews/E-INT-20100200-WeMustHaveAReferendumInIran.html.

- Susanto, Happy. 2011. "Democracy in Islam: comparative study of Muhammad Abid al-Jabiri and Abdolkarim Soroush's thoughts." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 1 (2): 253-72. <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i2.253-272>.
- Tabrizi, Behrooz Ghamari. 2004. "Contentious Public Religion: Two Conceptions of Islam in Revolutionary Iran: Ali Shari`ati and Abdolkarim Soroush." *International Sociology* 19 (4): 504-23. <https://doi.org/10.1177/0268580904047371>.
- . 2018. "Abdolkarim Soroush." Dalam *Key Islamic Political Thinkers*, disunting oleh John L. Esposito dan Emad El-Din Shahin. New York: Oxford University Press.
- Vakili, Valla. 1996. "Debating Religion and Politics in Iran: The Political Thought of Abdolkarim Soroush." Diakses 17 Desember 2019. http://www.drSOROUSH.com/English/On_DrSOROUSH/E-CMO-19960100-Debating_Religion_and_Politics_in_Iran-Valla_Vakili.html.
- Wahidah, Evita Yuliatul, dan Mohammad In'ami. 2020. "The Integration-Interconnection of Al-Qabdhu Wa Al-Basthu Nadlriyah Al-Shari`ah Abdul Karim Soroush With Psychology of Islamic Contemporary Education." *Desanta (Indonesian Of Interdisciplinary Journal)* 1 (1): 1-17.
- Wright, Robin. 1997. "Iran's Greatest Political Challenge: Abdol Karim Soroush." *World Policy Journal* 14 (2): 67-74.

Halaman ini sengaja dikosongkan